



KEBIJAKAN ENERGI DAN SUBSIDI ENERGI: TANTANGAN PEMIMPIN BARU INDONESIA

Rasbin*)

Abstrak

Berdasarkan indeks ESI, pengelolaan energi di Indonesia dianggap masih buruk. Dampaknya bisa dilihat dari sering terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan ekspor sumber energi primer yang tidak tepat. Selain permasalahan itu, pemerintah baru mendatang juga menghadapi masalah sempitnya ruang fiskal akibat terus membengkaknya subsidi energi terutama subsidi BBM. RAPBN 2015 misalnya, subsidi itu mengalami peningkatan sebesar 18,1 persen dibandingkan APBN-P 2014. Akibatnya, pemerintah tidak leluasa dalam mengimplementasikan program-program prioritasnya.

Pendahuluan

Pemimpin baru Indonesia periode 2014-2019 menghadapi satu masalah krusial, yakni masalah energi. Isu ini masih akan terus berlanjut seiring belum tercapainya bauran energi yang telah ditetapkan. Secara regional, pengelolaan energi di Indonesia juga dinilai

tidak lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, termasuk dengan sesama negara di Asia Tenggara. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Keberlangsungan Energi (*Energy Sustainability Index/ESI*) yang diterbitkan oleh *World Energy Council* (WEC) (Tabel 1).

Tabel 1. Indeks Keberlangsungan Energi 2013

Negara	Indeks	Skor	Keamanan Energi	Ekuitas Energi	Kelestarian Lingkungan
Malaysia	37	BBC	34	40	92
Singapura	47	BBD	124	43	51
Filipina	65	BBC	39	93	54
Indonesia	73	ACD	17	83	104
Thailand	89	CCD	91	88	101
Vietnam	101	CDD	77	102	105
Kamboja	118	CDD	121	113	67

Sumber: WEC 2014

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI, Email: ras9bin@yahoo.co.id



Tabel 1 menunjukkan bahwa tahun 2013, ESI Indonesia menduduki posisi ke-73 di bawah Malaysia, Singapura, dan Filipina. Berdasarkan dimensi keamanan energi, posisinya di peringkat ke-17, menduduki peringkat pertama di ASEAN. Namun demikian, posisi ekuitas energi Indonesia di posisi 83, masih di bawah Malaysia dan Singapura. Sedangkan keberlanjutan lingkungan Indonesia berada pada peringkat ke-104. Masing-masing dimensi, keamanan energi; ekuitas energi; dan keberlangsungan lingkungan, mendapat label A, C, dan D. Dari tiga dimensi tersebut, keamanan energi Indonesia dianggap sangat kuat, tetapi sebaliknya ekuitas energi Indonesia masih lemah begitu pula dengan kinerja kelestarian lingkungan. Meskipun demikian, tren ketiga dimensi terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012.

Indikator kinerja kekuatan politik dan ekonomi dari kinerja energi tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, sedangkan indikator kinerja kekuatan masyarakat konstan.

Selain masalah energi, pemerintah juga mengalami dilema dalam hal pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari tahun ke tahun subsidi ini terus meningkat. Perbandingan perkembangan subsidi BBM dan listrik tahun 2004 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada tahun 2015, anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 secara total mencapai Rp433,512 triliun. Dari jumlah ini, sebagian besar dananya tersedot untuk subsidi BBM mencapai Rp291,111 triliun atau naik Rp44,6176 triliun. Lebih lengkap tentang besaran dan struktur subsidi di Indonesia tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan subsidi BBM tahun 2015 diperkirakan mengambil porsi terbesar dibandingkan dengan subsidi lainnya. Sebagai contoh, subsidi listrik hanya sebesar Rp72,423 triliun atau 16,71 persen dari total energi. Jika subsidi BBM dan listrik ini dibandingkan terhadap total subsidi energi, subsidi BBM mencapai 80,08 persen sedangkan subsidi listrik hanya 19,92 persen. Bahkan bila dibandingkan dengan subsidi non-energi, subsidi energi khususnya BBM masih jauh lebih besar dan nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Meningkatnya subsidi energi terutama

Tabel 2. Subsidi BBM dan Listrik 2004 – 2014 (Triliun rupiah)

Tahun	BBM	Perubahan (%)	Listrik	Perubahan (%)
2004	69	-	2,3	-
2005	95,6	39	8,9	287
2006	64,2	-33	30,4	242
2007	83,8	31	33,1	9
2008	139,1	66	83,9	153
2009	45	-68	49,5	-41
2010	82,4	83	57,6	16
2011	165,2	100	90,4	57
2012	211,9	28	94,6	5
2013*	210	-1	100	6
2014**	246,5	17	103,8	4
2015***	291,1	18	72,4	-30

Sumber: Media Indonesia, 19 Agustus 2014

*Berdasarkan APBN-P 2013

**Berdasarkan APBN-P 2014

***Berdasarkan RAPBN 2015

Tabel 3. Struktur Subsidi di Indonesia dalam RAPBN 2015

No.	Jenis Subsidi	Nilai (Rp triliun)	Persentase*
1.	Total Subsidi	433,512	7,56
2.	Energi	363,534	28,87
3.	BBM	291,112	38,14
4.	Listrik	72,423	1,48
5.	Non Energi	69,978	35,66
6.	Pangan	18,940	0,62
7.	Pupuk	35,703	69,62
8.	Benih	0,939	-0,4
9.	Kewajiban Layanan Publik	3,261	48,43
10.	Suku Bunga Kredit	2,484	-23,24
11.	Pajak	8,650	83,53

Sumber: RAPBN 2015

*Perubahan terhadap APBN 2014

BBM dan listrik menyebabkan ruang fiskal semakin menyempit. Kondisi ini diperparah dengan pengelolaan energi yang dianggap masih buruk. Hal ini berdampak terhadap berbagai sektor ekonomi seperti infrastruktur. Padahal infrastruktur merupakan urat nadi untuk menggerakkan perekonomian.

Dampak Pengelolaan Energi

Energi seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam setiap periode pembangunan. Energi seharusnya menjadi pendorong bukan sebaliknya pengerem pembangunan. Hal ini diakibatkan oleh buruknya pengelolaan energi sebagaimana terlihat dalam ESI 2013.

Salah satu dampak kondisi ini adalah fenomena pemadaman listrik di beberapa daerah seperti di Medan, Sumatera Utara. Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Pemadaman listrik di Medan hampir terjadi setiap hari. Pemadaman listrik ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pengusaha.

Selain Medan, beberapa kota di Indonesia juga tidak lepas dari pemadaman listrik. Seperti Batam pada bulan April 2014, kemudian ada Pekanbaru Maret 2014, Jakarta dan Tangerang pun tak lepas dari pemadaman listrik (Mei 2014).

Kondisi ini terjadi karena sampai saat ini, PT PLN (Persero) sebagai pihak penghasil listrik, lebih banyak menggunakan bahan bakar dari fosil yang mencapai hampir 88 persen di mana 44 persen dari batubara, 23 persen BBM dan 21 persen gas alam. Padahal penggunaan bahan bakar fosil memerlukan biaya yang besar. Sedangkan penggunaan bahan bakar non-fosil yang biayanya rendah seperti panas bumi, matahari, hydro dan lainnya baru mencapai 13,7 persen.

Menurut Lembaga Konsumen Indonesia, jika masalah defisit listrik ini tidak secepatnya diatasi maka Indonesia dapat mengalami krisis listrik dua tahun lagi. Kondisi ini juga ikut diperparah dengan kebijakan ekspor batubara dimana produksi batubara Indonesia sekitar 75 persen di ekspor ke luar negeri sedangkan sisanya untuk kebutuhan domestik. Hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang memanfaatkan 95 persen produksi batubaranya untuk kebutuhan domestik. Begitu pula dengan Rusia, Polandia dan Afrika Selatan, negara-negara yang mengutamakan pemakaian

batubara untuk domestik terlebih dahulu.

Selain kebijakan ekspor batubara, kebijakan ekspor gas alam ke luar negeri juga menunjukkan adanya kekeliruan dalam pengelolaan energi dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) sekitar 44 persen gas alam Indonesia diekspor ke luar negeri seperti Taiwan, Thailand, Korea Selatan, dan Tiongkok. Padahal kebutuhan domestik khususnya kalangan industri akan gas alam mengalami defisit sekitar 300 juta kaki kubik. Akibatnya, defisit ini harus ditutup dengan impor gas alam dari sejumlah negara di Afrika.

Jika kondisi ini terus menerus terjadi, kalangan industri akan terganggu dalam hal produksinya. Implikasi besarnya, terganggunya pertumbuhan ekonomi karena banyak perusahaan yang tingkat produksinya tidak maksimal bahkan berhenti operasi sehingga berdampak terhadap output yang dihasilkan.

Sempitnya Ruang Fiskal

Terus meningkatnya subsidi energi khususnya subsidi BBM menyebabkan ruang fiskal pemerintah semakin kecil. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 subsidi BBM mencapai Rp 291,1 triliun mengalami peningkatan 18,1 persen dibandingkan pagu dalam APBN-Perubahan 2014 yakni 246,5 triliun rupiah (lihat Tabel 2). Terus membengkaknya subsidi BBM ini, menurut ekonom Megawati Institute Imam Sugema, membuat ruang fiskal pemerintah yang baru sempit sehingga sulit bergerak.

Sempitnya ruang fiskal, menurut Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan, menyebabkan pemerintah terbatas dalam membangun infrastruktur. Infrastruktur, menurut J'afar M (2007), memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana dalam jangka pendek dapat menciptakan lapangan kerja sedangkan jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait.

Melalui infrastruktur, negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung

tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri.

Selain pembangunan infrastruktur, sempitnya ruang fiskal juga akan mempengaruhi pergerakan pemerintah yang baru dalam mengerjakan program-program prioritas lainnya seperti program di bidang pendidikan dan kesehatan, juga program menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, sempitnya ruang fiskal merupakan masalah serius yang dihadapi pemerintah baru mendatang. Agar tersedia ruang fiskal yang luas, pemerintah baru mendatang dituntut untuk melakukan perubahan dalam skema pemberian subsidi.

Penutup

Pemerintah baru mendatang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo – Yusuf Kalla, akan menghadapi permasalahan yang serius terutama dalam hal kebijakan energi dan subsidi energi. Pengelolaan energi yang masih buruk akan mempengaruhi roda perekonomian sedangkan terus membengkaknya subsidi energi terutama subsidi BBM akan membuat semakin sempitnya ruang fiskal dalam mengimplementasikan program-program prioritas Pemerintah baru terutama dalam bidang energi sesuai visi mereka

Oleh karena itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo – Yusuf Kalla, akan memiliki tantangan yang berat dalam mengatasi permasalahan energi dan subsidi energi. Diperlukan komitmen atau terobosan politik yang kuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dukungan politik DPR juga menjadi prasyarat penting bagi pemerintah dalam pengelolaan energi nasional ke depan.

Referensi

- "Indeks Energi Masih Buruk", *Republika*, 14 Agustus 2014.
- "Ganggu Keseimbangan Neraca", *Republika*, 14 Agustus 2014.
- "RAPBN 2015 Sebaiknya Direstrukturisasi", *Media Indonesia*, 19 Agustus 2014.
- "Pelebaran Ruang Fiskal Demi Perbaikan", *Media Indonesia*, 18 Agustus 2014.
- "Jebakan Subsidi BBM", *Republika*, 14 Agustus 2014.
- "Indonesia Krisis Listrik di Lumbung Energi", <http://finance.detik.com/read/2013/11/04>

/120416/2403162/1034/1/indonesia-krisis-listrik-di-lumbung-energi, diakses tanggal 19 Agustus 2014.

- "Pasokan Kurang, Indonesia Dapat Mengalami Krisis Listrik", http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140515_indonesia_mati_listrik.shtml, diakses tanggal 20 Agustus 2014.
- "Rancangan APBN 2015: Ruang Revisi Terbuka Lebar", *Bisnis Indonesia*, 16 Agustus 2014.
- World Energy Council (WEC). 2014. Sustainability Index. WEC.
- "Debat Capres, Visi Energi, Pangan, dan Lingkungan Jokowi-JK", <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/debat-capres-visi-energi-pangan-dan-lingkungan-jokowi-jk>, diakses tanggal 25 Agustus 2014.